

STATUS QUO KEMIT DI KEBUMEN TAHUN 1948

STATUS QUO KEMIT IN KEBUMEN YEAR 1948

Oleh : Fajar Ardiansyah, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, fajarardiansyah97@gmail.com

Abstrak

Setelah Indonesia Merdeka, rakyat Kebumen masih harus berjuang untuk mempertahankan Kemerdekaan karena Belanda secara terang-terangan ingin kembali menguasai Indonesia dengan cara melancarkan Agresi Militer Belanda I dan II. *Status Quo* Kemit atau Garis Demarkasi yang ditentukan setelah Perjanjian Renville menyebabkan terbaginya wilayah Indonesia menjadi dua yaitu wilayah Indonesia dan wilayah Pendudukan Belanda. Garis *Status Quo* Kemit yang terletak di Kabupaten Kebumen merupakan garis pertahanan terluar milik Indonesia setelah Perjanjian Renville. Selama periode gencatan senjata setelah ditentukannya Garis *Status Quo* tersebut dijaga oleh Polisi Keamanan (PK). Dengan ditentukannya Garis *Status Quo* Kemit tersebut membuat kondisi di sekitar Garis *Status Quo* Kemit yang dirasakan oleh warga Kebumen semakin memprihatinkan seperti terjadinya kelaparan dan kemiskinan. Selain itu, kondisi politik dan militer yang mendesak, sebagai jalan keluarnya adalah membentuk Pemerintahan Militer di setiap pelosok daerah termasuk di desa-desa.

Kata Kunci: *Status Quo Kemit, Kebumen, 1948*

Abstract

After Indonesian Independence, Kebumen people still have to fight to maintain Independence because the Colonial openly want to regain control of Indonesia by launching the Colonial Military Aggression I and II. Status Quo Kemit or Demarcation Line determined after the Renville Agreement caused the division of Indonesian territory into two namely Indonesian territory and Colonial Occupied territory. The Status Quo Kemit Line located in Kebumen District is Indonesia's outermost defense line after the Renville Agreement. During the ceasefire period after the establishment of the Status Quo Line was guarded by the Polisi Kemanan (PK). With the determination of the Status Quo Kemit Line, the conditions around the Status Quo Kemit Line which are felt by Kebumen residents increasingly pay attention to such events as hunger and poverty. In addition, political and military conditions are needed, as a way out is to create a Military Government in every corner of the region including in the villages.

Keyword : *Status Quo Kemit, Kebumen, 1948*

PENDAHULUAN

Periode Revolusi terjadi pada tahun 1945 – 1950 atau Periode Pasca Kemerdekaan, Periode Revolusi ini yang ditandai dengan munculnya kesadaran nasional dan nilai-nilai Revolusi yang mampu menimbulkan berbagai perubahan-perubahan baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi secara cepat dan drastis sehingga mendorong munculnya perubahan untuk membebaskan diri dari segala bentuk imperialisme dan kolonialisme.¹

Periode revolusi di Kabupaten Kebumen di tandai dengan banyak didirikannya organisasi perjuangan oleh para pemuda, seperti organisasi Angkatan Muda (AM), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI), Hizbullah, Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Pemuda Puteri Indonesia (PPI), Badan Pendidikan Anak (BAPA), Persatuan Buruh Indonesia (PERBI), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Angkatan Oemat Islam (AOI), dan MUSLIMAT.²

¹ Fuad Yogo Hardyanto, "Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Kebumen Tahun 1945-1950", *Skripsi*, (Solo: UNS, 2010), hlm. 17-18.

² Bambang Edhy Prayitno, *Kisah Pak Narto Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: Dapur Buku, 2016), hlm. 74.

Selain itu pada Periode Revolusi di Kabupaten Kebumen juga ditandai dengan dibentuknya Angkatan Bersenjata seperti Badan Keamanan Rakyat (BKR), Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).³

Status Quo Kemit merupakan sebuah kesepakatan mengenai ditetapkan garis batas wilayah antara Indonesia dengan Belanda. Ditetapkannya *Gari Status Quo Kemit* merupakan kelanjutan setelah diadakannya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, Garis *Status Quo* Kemit ditentukan dan ditandatangani oleh pihak Indonesia dan Belanda yang ditengahi oleh seorang perwakilan dari pihak Komisi Tiga Negara (KTN), pada tanggal 24 Januari 1948 yang bertempat di sebuah rumah sederhana sebelah Barat jembatan Kemit, tepatnya di Karanganyar – Kebumen.⁴

³ Darto Harnoko dan Poliman, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*, (Yogyakarta: BPSNT, 1987), hlm. 35.

⁴ "Mengenang Status-Quo Kemit, dan 7 Pahlawan Penjaga Demarkasi Korban Kejahatan Perang Belanda", <https://kebumen2013.com/mengenang-status-quo-kemit-dan-7-pahlawan-penjaga-demarkasi-korban-kejahatan-perang-belanda/>, diakses 2 Februari 2019, pukul 11.20.

Status Quo berasal dari bahasa Latin yang artinya keadaan tetap sebagai-mana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya.⁵ Sementara itu, Dalam ilmu politik definisi dari *Status Quo* adalah Sikap politik dari warga Negara yang merasa sudah puas dengan kondisi yang ada pada saat sekarang ini dan terus berusaha untuk tetap mempertahankan keadaan tersebut.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas kondisi umum wilayah Kebumen pada Masa Kemerdekaan, proses ditentukannya Garis *Status Quo* Kemit Tahun 1948 dan kondisi di sekitar Kali Kemit ketika terjadi Agresi Militer Belanda II.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gottschalk metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁶ Metode

penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan cara-cara dalam penelitian dan penulisan sejarah.⁷ Dalam metode sejarah terdapat empat langkah utama penelitian sejarah yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi.⁸

Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data atau sumber sejarah. Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber terutama terhadap sumber-sumber primer, tujuan dari kritik sumber ialah agar tercapainya fakta-fakta sejarah yang baru menurut sejarawan itu sendiri. Pada tahap ini peneliti menelaah lebih jauh sumber tersebut untuk mendapat keautentikan dan kredibilitas sumber sejarah. Tujuannya untuk menafsirkan fakta sejarah dalam sumber sejarah secara objektif. Kritik sumber ini terdapat dua tahapan yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Interpretasi adalah melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang sudah dikumpulkan dan dilakukan kritik sumber terlebih dahulu. Tujuan adalah untuk mencari hal yang saling berkaitan

⁵ “Status Quo, Klarifikasi, Kondusif, Modus Operandi, Dan Provokator”, http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/la-manbahasa/petunjuk_praktis/608, diakses 10 Agustus 2019, pukul. 13.10.

⁶ Louis Gottschalk, *Mengertis Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI-PRESS, 2015), hlm. 42.

⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 83.

⁸ Sugeng Priyadi, *Sejarah Lokal : Konsep, Metode, dan Tantangannya*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 67.

antara fakta sejarah satu dengan fakta sejarah lainnya yang didapat dari sumber sejarah yang dikumpulkan dan sudah dilakukan kritik sumber terlebih dahulu. Penafsiran sejarah terdiri dari dua yaitu analisis dan sintesis. Tahapan yang terakhir adalah Historiografi atau penulisan sejarah yaitu langkah terakhir dengan menyajikan hasil dari penelitian yang penulis lakukan menjadi sebuah karya ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum Wilayah

Kebumen

Kebumen adalah salah satu kota yang masuk dalam wilayah Karesidenan Kedu Selatan yang terdiri dari dua Kabupaten yaitu Purworejo dan Kebumen. Dengan kondisi geografis Kabupaten Kebumen yang memiliki daerah pegunungan membujur dari barat sampai ke timur serta sebagian daerah yang masih terdapat hutan, merupakan lokasi strategis untuk para pejuang Indonesia yang melakukan strategi perang gerilya. Selain itu di Kabupaten Kebumen juga terdapat sungai yang memiliki peran penting, yaitu Sungai Kemit yang dijadikan sebagai garis pertahanan terakhir oleh pihak Indonesia dan berguna untuk menghambat pergerakan penjajah, selain itu Sungai

Kemit juga dijadikan sebagai Garis *Status Quo* pada awal tahun 1948. Kondisi tanah di wilayah Kebumen yang terdiri dari tanah sawah dan tanah kering tersebut, menjadikan mata pencaharian pokok penduduk Kebumen adalah bercocok tanam dan bertani dikarenakan keadaan tanahnya yang subur.⁹

Secara umum dalam periode Penjajahan Belanda di Kebumen, penggolongan masyarakatnya terdiri dari beberapa golongan yaitu : 1. Amtenaar merupakan sebutan bagi Pegawai Belanda yang biasa disebut dengan Priyayi; 2. Priyayi Pribumi yang terdiri dari Pamong Desa; 3. Kuli merupakan seorang petani yang memiliki pekulen atau garapan sawah dan mereka masih mampu untuk membayar pajak; dan 4. Rempo merupakan golongan paling bawah yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga serta kekuatan fisik.¹⁰

Namun ada pendapat lain, menurut Pak Narto (alm) yang merupakan seorang veteran perang wilayah Kebumen, pada saat itu masyarakat Kebumen dibagi menjadi beberapa golongan yaitu: 1. *Nedherlander* adalah penduduk Belanda yang tinggal di Indonesia; 2. *Vreemd de*

⁹ Darto Harnoko dan Poliman, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁰ Bambang Edhy Prayitno, *op.cit.*, hlm. 15-17.

Westerlongen adalah orang-orang Eropa bukan Belanda yang tinggal di Hindia Belanda; 3. *Vreemd de Oousterlingen* adalah orang-orang Asia yang berasal dari Cina, Arab dan Jepang; dan 4. *Inlander*, orang-orang Indonesia asli atau pada waktu itu sering disebut dengan Pribumi.¹¹

Jepang pertama kali mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Sementara itu Pasukan Jepang pertamakali masuk ke wilayah Kabupaten Kebumen pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah berhasilnya Jepang mengalahkan tentara Belanda di Pulau Jawa. Pada tanggal 8 Maret 1942 pihak Belanda bersedia untuk menandatangani Perjanjian Kalijati dan menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang tanpa syarat.¹²

Sejak awal kedatangan Jepang di Jawa disambut dengan baik oleh masyarakat pada saat itu karena dianggap menjadi penyelamat bangsa Indonesia agar terlepas dari belenggu penjajahan Belanda. Seiring berjalannya waktu, sikap tentara Jepang terhadap rakyat Indonesia semakin berubah. Struktur Pemerintahan dirubah,

Pengibaran Bendera Merah Putih mulai dilarang dimana-mana dan diganti dengan Bendera Jepang atau *Hino Maru* serta lagu kebangsaan Indonesia Raya mulai diganti menjadi *Kimigayo*.¹³

Pada tanggal 3 Oktober 1943, dibentuk pasukan sukarela yang diberi nama "PETA" atau "Pembela Tanah Air". Di Kebumen terdapat dua Batalyon PETA yaitu *Kedu Dai I Daidan Gombong* dan *Kedu Dai III Daidan Gombong*.

Secara mengejutkan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu, yang mana sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 1945 Kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 Kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Dengan begitu maka di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan dan kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia untuk memerdekakan diri pada tanggal 17 Agustus 1945.¹⁴

Meski Kemerdekaan Indonesia sudah ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945, namun rakyat Indonesia

¹¹ *Ibid.*, hlm. 17-18.

¹² Hendri F. Isnaeni dan Apid, *Romusa : Sejarah Yang Terlupakan*, (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 24-26.

¹³ Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977/1988), hlm. 159-160.

¹⁴ Darto Harnoko dan Poliman, *op.cit.*, hlm. 25.

masih harus menghadapi kedatangan Sekutu dan Belanda yang kembali lagi ke Indonesia. Selain itu Indonesia juga harus menghadapi Agresi Militer Belanda I yang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947. Pasukan Belanda berhasil menduduki Kabupaten Kebumen dan menguasai daerah Gombang pada tanggal 4 Agustus 1947.¹⁵ Akhirnya Agresi Militer Belanda I berhasil dihentikan setelah pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memaksa pihak Belanda untuk menyetujui diadakannya gencatan senjata dengan Republik Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1947.¹⁶

B. Kali Kemit Sebagai Garis

Dermarkas

Agresi Belanda I yang berhasil dihentikan pada tanggal 27 Agustus 1947 dengan diadakannya gencatan senjata dengan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari Gencatan Senjata tersebut maka diadakan sebuah Perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu Perjanjian Renville yang disepakati pada tanggal 17 Januari 1948, isi Perjanjian tersebut

terdiri dari 3 point utama, yaitu: 1. Pihak Belanda hanya mengakui wilayah Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia; 2. Persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya Garis *Status Quo* atau Garis van Mook ; dan 3. Pasukan bersenjata Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.¹⁷

Meskipun pada kenyataannya hasil dari Perjanjian Renville merugikan pihak Indonesia dan Angkatan Bersenjata Indonesia, TNI tetap menerima keputusan politik Pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Renville. Maka dengan terpaksa Pejabat Negara, TNI dan sebagian warga sipil melakukan perpindahan dari Jawa Barat dan Jawa Timur menuju ke Jawa Tengah.

Setelah Perjanjian Renville, salah satu dampaknya adalah diresmikannya Garis *Status Quo* di berbagai perbatasan wilayah Belanda dan Indonesia sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian Renville. Salah satunya adalah Garis *Status Quo* Kemit yang berada di daerah Gombang, Kabupaten

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36-37.

¹⁶ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 339.

¹⁷ K. M. L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renville*. (Jakarta: Gunung Agung, 1986), hlm. 36.

Kebumen. Garis *Status Quo* yang ditetapkan di Gombang adalah Sungai Kemit, Sungai Kemit memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Garis *Status Quo* dengan alasan sungai tersebut menjadi garis pertahanan terakhir Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada saat terjadi serangan dadakan dari Pasukan Belanda. Selain itu, Sungai Kemit merupakan sungai yang dalam dan lebar sehingga akan sulit untuk dilalui jika tidak melewati jembatan utama yaitu Jembatan Kemit. Bukan hanya itu saja, daerah di sekitar Sungai Kemit terdapat area persawahan terbuka dan jalan utama Kabupaten Kebumen, sehingga berpotensi untuk dijadikan wilayah Demiliterisasi setelah ditentukannya Garis Status Quo Kemit.

Berdasarkan usul dari pihak KTN perundingan mengenai ditetapkannya Garis *Status Quo* Kemit diadakan pada tanggal 24 Januari 1948 antara Indonesia dengan Belanda yang ditengahi oleh seorang perwakilan dari Komisi Tiga Negara (KTN). Untuk perwakilan masing-masing pihak berjumlah 12 orang, perwakilan dari Indonesia di pimpin oleh Panglima TNI Divisi III Kolonel Bambang Soengeng dan untuk

perwakilan pihak Belanda dipimpin oleh oleh Letkol Beets.¹⁸

Perundingan mengenai Penetapan Garis *Status Quo* Kemit bertempat di sebuah rumah yang jauhnya kurang lebih 1 Km dari perbatasan wilayah Indonesia dan Belanda. Pada saat akan dimulainya Perundingan, perwakilan dari Pihak Indonesia bersama dengan 1 orang perwakilan dari KTN berjalan kaki dari arah timur menuju ke sebuah rumah tempat dilaksanakannya perundingan. Selain itu salah satu perwakilan dari pihak Indonesia sambil membawa bendera putih yang di ikatkan pada setangkai bambu, arti dari bendera putih tersebut sebagai isyarat gencatan senjata atau mengadakan negosiasi di sebuah medan perang.¹⁹

Setelah terjadi negosiasi terkait perundingan Peresmian Garis *Status Quo* Kemit, pada hari itu juga tanggal 24 Januari 1948 ditetapkanlah Garis *Status Quo* Kemit di Gombang berupa aliran Sungai Kemit yang menjadi Garis *Status*

¹⁸ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *Gelegear Di Bagelen : Perjuangan Resimen XX Kedu Selatan 1945-1949 Dan Pengabdian Lanjutannya*, (Kebumen , Ikatan Keluarga Resimen XX Kedu Selatan, 2003), hlm. 170.

¹⁹ Koleksi Foto Tentang Perundingan Garis Status Quo Kemit di Gombang 24 januari 1948, www.nationaalarchief.nl , diakses pada tanggal 1 Juli 2019, pukul 17.42 WIB.

Quo. Setelah perundingan mengenai Peresmian Garis *Status Quo* telah selesai, langkah selanjutnya yang dilakukan PBB melalui KTN adalah memperlebar zona demiliterisasi kurang lebih sejauh 1 Km, ketentuan ini berlaku untuk Pihak Indonesia dan Belanda agar tidak terjadi kontak senjata apapun di batas Garis *Status Quo*.²⁰

Untuk menandai Garis *Status Quo* yang masing-masing jauhnya kurang lebih 1 Km, dipasang sebuah papan kayu berukuran 100x60 cm bertuliskan *Status Quo* menggunakan cat berwarna putih. Setelah diresmikannya Garis *Status Quo* tersebut yang menandakan bahwa aliran Sungai Kemit dari Utara sampai Selatan merupakan batas pertahanan terluar yang dimiliki Indonesia.

Untuk menjaga Garis *Status Quo* Kemit tersebut, pihak Indonesia melalui Kementerian Pertahanan pada saat itu dibentuklah sebuah satuan kepolisian penjaga Garis *Status Quo* yang diberi nama Polisi Kemanan (PK) yang dipimpin oleh Ali Affandi dan berjumlah 7 anggota.

Tidak hanya pihak Indonesia saja yang mempersiapkan Polisi Khusus untuk menjaga Garis *Status Quo*, Belanda pun melakukan hal yang sama

yaitu membentuk Kepolisian bernama *Detasement Politie* (DP) dan pasukan khusus yang terdiri dari orang-orang Cina bernama *Pao An Tui* (PAT).²¹

Memasuki bulan Desember 1948 walaupun dalam kondisi gencatan senjata setelah Perjanjian Renville, perundingan-perundingan yang diadakan antara Indonesia dan Belanda tetap dilaksanakan akan tetapi mulai menemui jalan buntu. Merasa tidak ada titik akhir dalam setiap perundingan, sebagai keputusan pihak Belanda merencanakan penghancuran terhadap Indonesia dengan cara menyerang dan merebut Ibu Kota Indonesia yang pada saat itu berada di Yogyakarta. Pada tanggal 4 Desember 1948, Wakil Presiden Mohammad Hatta di Yogyakarta telah menyatakan bahwa kondisi hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin memburuk.²²

Benar saja, secara tiba-tiba pada jam 04.30 tanggal 19 Desember 1948 Pasukan Belanda mulai bergerak melewati Garis *Status Quo* Kemit, tindakan Belanda ini benar-benar menjadi bukti nyata bahwa Belanda

²⁰ Aneta, "De Status-Quo Lijnen", *De Locomotief*, (No. 151, 2 Maret 1948), hlm. 1.

²¹ Wiyanto, BA, dkk, *Kebumen Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949*, (Gombong: Grafika Gombong, 2001), hlm. 49.

²² Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit.*, hlm. 181.

sudah melanggar Perjanjian Renville dan melancarkan Agresi Militernya yang kedua.²³ Tidak lama kemudian sekitar pukul 05.30 setelah Belanda melewati Garis *Status Quo*, pola penyerangan yang dilakukan Belanda untuk memasuki daerah pertahanan Indonesia yaitu melalui dua jalur, jalur yang pertama melewati jalan utama dan jalur yang kedua melewati jalur kereta api.²⁴

Ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, 7 anggota Polisi Keamanan (PK) yang berjaga di Garis *Status Quo* tidak luput dari serangan Belanda dan seluruh anggota PK tersebut terbunuh.²⁵ Kurang lebih pukul 06.00 pagi Belanda berhasil menerobos masuk ke Kota Kebumen, Setelah Belanda berhasil menduduki kota Kebumen, kondisi di dalam Kota Kebumen sudah kosong karena sebelum Belanda masuk Kota Kebumen sudah ditinggalkan bahkan bangunan-bangunan sudah dibakar habis oleh para pejuang dan warga. Setelah Belanda berhasil menguasai Kebumen, siang harinya pukul 12.30 tanggal 19 Desember 1948 Belanda mulai bergerak dengan sasaran selanjutnya adalah

Kabupaten Purworejo. Pada pukul 17.00 konvoi Pasukan Belanda berhasil menguasai Purworejo, beruntung pada saat itu Komandan beserta Anggota Batalyon Mobil III Sroehardoyo dan Batalyon Teritorial Kedu IV/Purworejo sudah pergi dari Purworejo.²⁶

Meskipun pada saat itu Ibu Kota Yogyakarta telah jatuh ke tangan Belanda, namun masih terdapat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi Sumatera Barat. Sejak diresmikannya PDRI, namun pemerintah RI masih berlangsung di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dengan sistem Pemerintahan Militer yang dijabat oleh Pemerintah Militer Setempat.²⁷

Memasuki awal tahun 1949, perlawanan dari para Pejuang Republik Indonesia semakin gencar dilaksanakan melalui Strategi Perang Gerilya melancarkan serangan umum dan mencoba merebut kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda diantaranya Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Ibu Kota Yogyakarta. Perlawanan Pejuang Indonesia yang melakukan berbagai

²³ Darto Harnoko dan Poliman, *op.cit.*, hlm. 43.

²⁴ Bambang Edhy Prayitno, *op.cit.*, hlm. 99.

²⁵ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit.*, hlm. 172.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 193.

²⁷ Djoko Sudantoko, dkk, *Lintas Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, (Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, 2012), hlm. 20.

penyerangan di Kabupaten Kebumen pada bulan Februari 1949 berhasil membuat Pasukan Belanda di bawah Pimpinan Kolonel Beets menyerah dan meminta diadakan perundingan.²⁸

Selanjutnya serangan umum yang dilakukan Para Pejuang Indonesia di Purworejo yang dipimpin oleh Mayor Sroehardoyo terbagi menjadi dua penyerangan, yaitu pada tanggal 17 Januari 1949 dan 17 Februari 1949. Namun kedua serangan tersebut tidak berhasil merebut kota Purworejo.²⁹

Pejuang Indonesia di bawah Pimpinan Letnan Kolonel Soeharto mendapatkan suatu kemenangan besar ketika melakukan Operasi Khusus penyerangan terhadap Belanda yang menguasai Ibu Kota Yogyakarta. Pihak Indonesia bisa kembali merebut Ibu Kota Yogyakarta selama 6 jam pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.³⁰ Peristiwa Serangan Umum terhadap Kota Yogyakarta memaksa Pihak Belanda mengakui keberadaan dan kemampuan TNI dan Pejuang Indonesia. Hal tersebut didukung juga oleh siaran Radio dalam menyiarkan peristiwa di Yogyakarta sehingga

menyebar ke seluruh dunia dan didengar oleh Dewan Keamanan PBB.

Setelah mendengar kabar berita lewat Radio, Dewan Keamanan PBB mengirim KTN ke Indonesia yang terdiri dari 3 Negara yaitu Amerika, Belgia dan Australia. Dewan Keamanan PBB memerintahkan kepada Pihak Belanda agar menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag,³¹ dan Pada tanggal 27 Desember 1949 Negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatannya atas Indonesia.³²

Setelah diadakannya KMB pada tanggal 23 Agustus 1949, Pihak Belanda juga menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia di wilayah Kedu Selatan. Upacara penyerahan kekuasaan di daerah Gombong dan Kebumen dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 1949.³³ Sedangkan untuk daerah Pituruh, Kutoarjo dan Purworejo dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 1949.³⁴

²⁸ Bambang Edhy Prayitno, *op.cit.*, hlm. 101.

²⁹ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit.*, hlm. 234.

³⁰ M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 349.

³¹ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit.*, hlm. 264.

³² M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 350.

³³ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit.*, hlm. 264.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 266-267.

C. Kondisi Sekitar Kali Kemit Pada Saat Agresi Militer Belanda II

Perjanjian Renville yang diharapkan menjadi penyelesaian berbagai permasalahan antara Indonesia dan Belanda dengan adanya gencatan senjata, namun Perjanjian tersebut justru kembali dilanggar oleh Pihak Belanda dan melancarkan Agresi Militer II yang dilancarkan Belanda terhadap Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Agresi Militer Belanda II tersebut menyebabkan berbagai permasalahan yang dialami oleh rakyat Kebumen di sekitar Garis *Status Quo* Kemit.

Permasalahan sosial yang dialami rakyat Kebumen di sekitar Garis *Status Quo* Kemit seperti terjadinya bencana kelaparan dan kemiskinan. Bencana Kelaparan dan kemiskinan tersebut semakin diperparah ketika banyaknya pengungsi dari wilayah Jawa Barat yang berpindah ke Jawa Tengah dan menetap di sekitar Garis *Status Quo* Kemit. Dari Bencana kelaparan dan kemiskinan tersebut juga memunculkan permasalahan sosial lainnya seperti terjadinya perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap warga di sekitar Garis *Status Quo* Kemit.

Permasalahan yang selanjutnya dihadapi yaitu permasalahan ekonomi yang juga menjadi permasalahan serius

setelah Perjanjian Renville sampai terjadinya Agresi Militer Belanda II. Dampak dari adanya Garis *Status Quo* adalah pembatasan wilayah sehingga area persawahan di sekitar Kali Kemit yang luasnya kurang lebih 3900 ha berkurang drastis menjadi 700 ha yang berada di wilayah Indonesia. Sedangkan 3200 ha berada di wilayah Belanda. Jumlah area persawahan tersebut tidak cukup untuk menghidupi jumlah rakyat yang berada di sekitar Garis *Status Quo* Kemit yang pada saat itu kurang lebih sebanyak 35.000 jiwa. Jumlah itu belum lagi ditambah dengan rakyat Indonesia yang mengungsi dari Jawa Barat dan menetap di sekitar Garis *Status Quo*.³⁵ Permasalahan ekonomi tersebut semakin diperparah dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Belanda untuk menghentikan jalur perekonomian menuju wilayah Indonesia. Permasalahan ekonomi yang terjadi ketika Agresi Militer Belanda II tidak hanya dirasakan oleh rakyat saja, tetapi para Pejuang atau TNI pun juga ikut merasakan permasalahan ekonomi tersebut terutama masalah pasokan makanan.³⁶

Permasalahan politik dan militer juga menjadi permasalahan yang dihadapi

³⁵ *Het Dagblad*, (No. 143, 21 Maret 1948), hlm. 1.

³⁶ Bambang Edhy Prayitno, *op.cit.*, hlm. 100.

oleh Indonesia di sekitar Garis *Status Quo* Kemit. Permasalahan politik yang dialami terutama ketika Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda pada Agresi Militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 yang dikhawatirkan Pemerintahan Indonesia menjadi hancur. Namun permasalahan itu bisa secepatnya diatasi dengan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi. Selain itu khusus di Pulau Jawa dibentuk Pemerintah Militer yang dilaksanakan di setiap desa-desa.

Untuk Kabupaten Kebumen sendiri terdapat Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) dan Pemerintah Militer Kecamatan (PMKT) atau disebut juga Pemerintah Militer Onderan (PMO). Yang menjabat Kepala Pemerintah Militer Kabupaten adalah seorang Komandan Teritorial Kabupaten dan sedangkan Kepala Pemerintah Militer Kecamatan adalah seorang Komandan Teritorial Kecamatan. PMKB Kebumen juga memiliki seorang Wedana militer yang bertugas di wilayah Kawedanan, Wedana tersebut dijabat oleh seorang perwira militer khusus untuk bertugas di Kawedanan, Wedana tersebut juga disebut dengan Opsir Pekerjaan Istimewa (OPI). Tugas OPI tersebut adalah sebagai kepanjangan tangan dari Kepala PMKB,

sekaligus merangkap sebagai pengawas atau penasehat Kepala PMKT.³⁷

Selain membentuk pemerintah militer di desa-desa, untuk mengatasi permasalahan militer di tiap desa-desa PMKB dan PMKT juga membentuk sebuah Pasukan Gerilya Desa atau Pager Desa yang berperan juga dalam Perang Gerilya melawan Belanda. Pager Desa dipimpin oleh Komandan Onder Distrik Militer (KODM) atau PMKT. Tugas dari Pager Desa adalah melakukan pembumi hangusan, menyelidiki musuh, menyampaikan berita, memata-matai musuh, melakukan provokasi terhadap musuh, meronda, melakukan perusakan alat komunikasi musuh, dan menyelamatkan penduduk, barang, dll.³⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Garis *Status Quo* Kemit di Kebumen ditentukan pada tanggal 24 Januari 1948 antara Indonesia dengan Belanda yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTIN). Penentuan Garis *Status Quo* Kemit merupakan kelanjutan dari Perjanjian Renville yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948. Penentuan

³⁷ Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *op.cit*, hlm. 209.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 215-217.

Garis *Status Quo* atau disebut juga Garis van Mook merupakan salah satu point yang disepakati oleh pihak Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian Renville.

Garis *Status Quo* yang ditetapkan adalah berupa aliran Sungai Kemit atau Kali Kemit yang mana Sungai Kemit tersebut yang dijadikan pertahanan terakhir oleh Pejuang Indonesia di Kabupaten Kebumen ketika Pasukan Belanda yang pada saat itu melancarkan Agresi Militer I dan berhasil menduduki Gombang. Sungai Kemit tersebut juga memiliki potensi untuk dipilih menjadi Garis *Status Quo* yaitu keadaan Sungai Kemit yang dalam dan lebar sehingga akan sulit dilalui jika tidak melalui jembatan utama. Selain itu di sekitar Sungai Kemit juga terdapat area persawahan terbuka dan jalan utama Kabupaten Kebumen sehingga berpotensi untuk dijadikan zona Demiliterisasi.

Dampak dari ditentukannya Garis *Status Quo* tersebut menyebabkan harus berpindahannya seluruh Pejabat Negara, TNI, dan sebagian warga sipil dari wilayah Belanda ke wilayah Indonesia. Garis *Status Quo* tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku kembali ketika Belanda secara terang-terangan melancarkan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948 yang bertujuan untuk benar-benar

menghancurkan Pemerintahan Indonesia yang waktu itu berpusat di Yogyakarta.

Pada saat terjadinya Agresi Militer Belanda II tersebut, Kebumen, Purworejo dan Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda. Kondisi tersebut menyebabkan semakin parah penderitannya yang dirasakan oleh rakyat Indonesia seperti terjadinya bencana kelaparan dan kemiskinan di mana-mana. Namun meskipun Pusat Pemerintahan Indonesia di Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda, Pihak Indonesia masih sempat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, selain itu khusus di Jawa dibentuk juga Pemerintah Militer. Untuk Kabupaten Kebumen sendiri terdiri dari Pemerintah Militer Kabupaten (PMKB) dan Pemerintah Militer Kecamatan (PMKT) atau sering disebut juga Pemerintah Militer Onderan (PMKO). Selain itu di setiap desa-desa juga dibentuk Pasukan Gerilya Desa atau Pagar Desa yang ikut berperan melawan Belanda.

Pendudukan Belanda terhadap wilayah-wilayah Indonesia seperti Kebumen dan Purworejo terutama Ibu Kota Yogyakarta, berhasil direbut kembali oleh Pihak Indonesia setelah dilancarkannya Operasi Khusus pada tanggal 1 Maret 1949 atau sering disebut Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan

target merebut kembali Yogyakarta dari tangan Belanda. Pendudukan Belanda di Indonesia benar-benar berakhir setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Komisi Tiga Negara (KTN) mendesak Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bunda (KMB) di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949, dan mulai tanggal 27 Desember 1949 Negeri Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatannya atas Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Edhy Prayitno, *Kisah Pak Narto Dari Masa Ke Masa*, Jakarta: Dapur Buku, 2016.
- Darto Harnoko dan Poliman, *Perang Kemerdekaan Kebumen Tahun 1942-1950*, Yogyakarta: BPSNT, 1987.
- Djoko Sudantoko, dkk, *Lintas Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia*, Jakarta: Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, 2012.
- Hendri F. Isnaeni dan Apid, Romusa : Sejarah Yang Terlupakan, Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Gottschalk, Louis, *Mengertis Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI-PRESS, 2015.
- Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Tengah*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977/1988.
- Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Soetardjo Wirjopranoto, dkk, *Gelegear Di Bagelen : Perjuangan Resimen XX Kedu Selatan 1945-1949 Dan Pengabdian Lanjutannya*, Kebumen , Ikatan Keluarga Resimen XX Kedu Selatan, 2003.
- Sugeng Priyadi, *Sejarah Lokal : Konsep, Metode, dan Tantangannya*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Tobing, K. M. L, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renville*. Jakarta: Gunung Agung, 1986.
- Wiyanto, BA, dkk, *Kebumen Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945-1949*, Gombong: Grafika Gombong, 2001.

Internet

“Koleksi Foto Tentang Perundingan Garis Status Quo Kemit di Gombong 24 januari 1948”, www.nationaalarchief.nl , diakses pada tanggal 1 Juli 2019.

“Mengenang Status-Quo Kemit, dan 7 Pahlawan Penjaga Demarkasi Korban Kejahatan Perang Belanda”, <https://kebumen2013.com/mengenal-status-quo-kemit-dan-7-pahlawan-penjaga-demarkasi-korban-kejahatan-perang-belanda/>, diakses 2 Februari 2019.

“Status Quo, Klarifikasi, Kondusif, Modus Operandi, Dan Provokator”,
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/608, diakses 10 Agustus 2019

Skripsi

Fuad Yogo Hardyanto, “Perang Mempertahankan Kemerdekaan di Kebumen Tahun 1945-1950”,
Skripsi, Solo: UNS, 2010.

Surat Kabar

Aneta, “De Status-Quo Lijnen”, *De Locomitief*, No. 151, 2 Maret 1948.



Pembimbing TAS

Ita Mutiara Dewi, S.I.P., M.Si.
NIP. 19810321 200312 2 001

Yogyakarta, 25 Agustus 2019

Reviewer

Danar Widiyanta, M.Hum.
NIP. 19681010 199403 1 001